

ABSTRAK

Program pendidikan inklusif diselenggarakan untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 254 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Disabilitas Periode 2024–2028. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pendidikan inklusif di SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn sebagai landasan analisis, dengan fokus pada indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, serta disposisi atau sikap pelaksana. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lingkungan sekolah, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan inklusif di SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan melalui penerimaan ABK dan komitmen sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang setara. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena belum tersedianya Guru Pembimbing Khusus (GPK), kompetensi guru dalam menangani ABK masih terbatas, sarana dan prasarana pendukung belum memadai, serta dukungan pemerintah belum optimal. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sumber daya, penguatan kapasitas guru, dan dukungan yang lebih maksimal dari pemerintah agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berlangsung secara lebih efektif.

Kata Kunci: pendidikan inklusif, implementasi kebijakan, anak berkebutuhan khusus (ABK).